

KEBIJAKAN JEPANG DALAM SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI PAKUALAMAN TAHUN 1942–1945

Oleh : Resiani Melinda, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta, melinda.resiani@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan sangat digencarkan. Melalui pendidikan, Jepang dapat menanamkan pemikirannya yaitu cita-cita kemakmuran lingkungan Asia Raya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan dan pengajaran yang diterapkan oleh Jepang di wilayah Pakualaman tahun 1942–1945. Pakualaman merupakan wilayah *kooti* yang dapat mengatur sendiri wilayah kekuasaannya, namun tetap diawasi oleh pemerintahan Jepang khususnya dalam hal pendidikan. Pada akhir tahun 1942 Jepang telah menerapkan kebijakannya di Pakualaman. Sistem pendidikan diubah menjadi sistem pendidikan tunggal. Sekolah dengan sistem kolonial yang berdasarkan lapisan sosial dihapuskan dan digantikan dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang. Kebijakan tersebut membuka lebar kesempatan masyarakat Pakualaman untuk mengikuti kegiatan persekolahan. Upacara, latihan fisik, olahraga dan kerja bakti dimasukan dalam kurikulum pendidikan. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan tersebut berdampak pada kualitas pendidikan di Pakualaman yang semakin menurun. Peran guru menjadi cukup dominan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Guru menjadi penyebar doktrin Jepang di sekolah. Masalah kelangkaan guru di Pakualaman menjadi masalah utama dalam bidang pengajaran. Kebijakan Jepang dalam bidang pengajaran antara lain dengan membuka sekolah, pelatihan guru, dan kursus Bahasa *Nippon*. Guru dinaikkan statusnya menjadi pegawai negeri, namun disisi lain kebijakan Jepang tersebut tetap membawa dampak buruk bagi para guru.

Kata Kunci: *Kebijakan Jepang, Pendidikan, Pakualaman*

JAPANESE POLICY IN THE SYSTEM OF EDUCATION AND TEACHING IN PAKUALAMAN 1942–1945

Abstract

During the Japanese occupation, education was intensified. Through education, Japan can instill its thoughts, namely the ideals of Greater Asia's prosperity. The purpose of this research is to find out the education and teaching policies implemented by Japan in the Pakualaman region in 1942-1945. Pakualaman is a *kooti* area that can regulate its own territory, but is still supervised by the Japanese government, especially in terms of education. At the end of 1942 Japan had implemented its policy at Pakualaman. The education system is transformed into a single education system. Schools with colonial systems based on the social layer were abolished and replaced with the education system implemented by Japan. The policy opened the opportunity for Pakualaman people to take part in school activities. Ceremonies, physical training, sports and community service were included in the education curriculum. Japanese policies in the education sector have an impact on the quality of education in the Pakualaman which is declining. The teacher's role becomes quite dominant in teaching and learning activities in schools. The teacher became a spreader of Japanese doctrine. The problem of shortage of teachers in the Pakualaman is a major problem in the field of teaching. Japanese policies in the field of teaching include opening schools and teacher courses. Pakualaman teachers attend teacher training and *Nippon* language courses. The teacher was raised to become a civil servant, but on the other hand Japanese policy still had a negative impact on the teachers.

Keywords: Japanese Policy, Education, Pakualaman

PENDAHULUAN

Pemerintahan kolonial Belanda yang panjang telah meninggalkan berbagai bentuk penderitaan bagi rakyat Indonesia, terutama pada lapisan terbawah. Kekurangan pangan, sandang, papan dan rendahnya tingkat kesehatan telah lama membebani rakyat. Disisi lain, upah kerja yang rendah, adanya kerja paksa, dan pajak yang harus dibayar, berjalan begitu saja dalam upaya eksploitasi dengan diiringi diskriminasi. Pemerintah kolonial Belanda cenderung mengeruk keuntungan yang semakin lama akan membuat buruknya masa depan yang tidak saja menimpa rakyat Indonesia, tetapi juga kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda.¹

Setelah Jepang menduduki daerah Indonesia, pemerintah pendudukan melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan pemerintahan selanjutnya di bawah komando militer Jepang. Jepang segera mendirikan badan-badan dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang ditinggalkan orang-orang Belanda. Pemerintah pendudukan mendatangkan tenaga pegawai sipil dari Jepang untuk membantu melaksanakan tugas-tugas ini, akan tetapi jumlahnya masih belum mencukupi. Untuk dapat mengisi jabatan-jabatan yang ditinggalkan orang-orang Belanda, maka pemerintah pendudukan Jepang mengangkat orang-orang pribumi yang terdidik untuk dapat mengisi kekosongan jabatan tersebut.²

Pendudukan balatentara Jepang atas Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam

¹Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Imporium sampai Emporium 1500–1900*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 289.

²M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi: 2005), hlm. 411.

upaya menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Strategi pendudukan Jepang mendasarkan seluruh kebijakannya pada kepentingan untuk kemenangan perang Asia Timur Raya.³ Kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia berkaitan dengan kemenangan peperangan di Pasifik. Pada dasarnya kebijakan yang diterapkan mempunyai dua prioritas. Pertama, menghapuskan pengaruh Barat. Kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemajuan perang Jepang. Kebijakan-kebijakan Jepang tersebut dijalankan melalui tiga prinsip, yaitu mencari dukungan rakyat, memanfaatkan struktur pemerintahan yang telah ada, dan penerapan sistem autarki.⁴

Upaya untuk mendapatkan dukungan dari penguasa lokal seperti Yogyakarta dan Pakualaman adalah dengan mengukuhkan status istimewa mereka dengan nama Yogyakarta *Kooti* dan Pakualaman *Kooti*. Ketika masa pendudukan Jepang berlangsung, ada empat wilayah yang diakui sebagai wilayah *Kooti*, yakni Yogyakarta *kooti*, Paku Alaman *Kooti*, Mangkunegaran *Kooti*, dan Surakarta *Kooti*.⁵ Wilayah *kooti* artinya bahwa wilayah ini diberi hak untuk mengadakan pemerintahan sendiri dan terikat melalui sumpah setia dengan pemerintah pendudukan Jepang. Penguasa daerah *Kooti* tersebut mendapat sebutan *Koo*. Pemerintah Jepang memberikan kekuasaan kepada Paku Alam

³Fajriudin Muttaqin dan Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, (Bandung: Humaniora, 2015), hlm. 79.

⁴Hariyono, *Penerapan status bahaya di Indonesia: Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru*, (Jakarta: Pensil-324, 2008), hlm. 86.

⁵Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 271-274.

Koo untuk mengatur enam bagian dalam pemerintahan, pemerintahan tersebut antara lain bagian panitera, bagian penerangan dan propaganda, bagian urusan umum, bagian pengajaran, bagian ekonomi, dan bagian yayasan umum.

Dalam usaha menarik simpati rakyat, pemerintah Jepang memberi kesempatan kepada semua penduduk untuk memperoleh pendidikan. Berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah Jepang tidak menyediakan pendidikan yang berdasarkan pada perbedaan rasial etnis. Semua sekolah, terutama sekolah dasar statusnya sama.⁶ Dengan demikian sekolah yang semula dirasakan sebagai sekolah elit non elit menjadi hilang. Peran tenaga pengajar sangat penting dalam dunia pendidikan. Jepang menganggap bahwa peran guru sangat berpengaruh dalam menyebarkan doktrin-doktrin Jepang di setiap sekolah. Guru-guru mendapat gaji sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Heuristik merupakan proses

mengumpulkan atau menemukan sumber yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Tahap kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber, yaitu upaya untuk mendapatkan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (kebenaran sumber).⁷ Tahap ketiga yaitu interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Interpretasi digunakan untuk mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang logis dan bermakna. Tahap keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Setelah semua proses atau langkah dalam metode penelitian selesai maka dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN

A. KEADAAN UMUM MASYARAKAT PAKUALAMAN 1942-1945

Wilayah Pakualaman terdiri dari wilayah kota dan luar kota.⁸ Wilayah dalam kota meliputi sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yaitu daerah yang terletak di timur Sungai Code yang menjadi tempat kediaman Paku Alam I yang juga dijadikan pusat pemerintahan bagi daerah Pakualaman atau sering disebut dengan Puro Pakualaman. Wilayah Pakualaman yang berada di daerah kota atau sekitar Pakualaman merupakan

⁶Sri Sutjaningsih, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 113.

⁷Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 35.

⁸Haryadi Baskoro, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 11-12.

daerah dataran rendah. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Kasultanan Yogyakarta dari berbagai arah. Sedangkan wilayah luar kota yaitu wilayah Adikarto. Secara geografis, Adikarto terletak di sebelah barat daya Yogyakarta. Batas wilayah Adikarto di sebelah selatan ditandai dengan Samudra Hindia. Sebelah barat dibatasi oleh Sungai Bogowonto yang memisahkan wilayah Adikarto dengan Purworejo.⁹ Kabupaten Kulon Progo menjadi batas Adikarto dibagian utara, sedangkan dibagian timur ditandai oleh Sungai Progo yang menjadi batas dengan wilayah Kabupaten Bantul.

Perekonomian Pakualaman bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Wilayah Pakualaman dalam kota penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Sedangkan penduduk Adikarto sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, baik pertanian tanaman pangan maupun pertanian tanaman industri perkebunan. Pertanian tanaman pangan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok sehari-hari. Pertanian tanaman industri perkebunan dikerjakan oleh penduduk untuk mendapat upah. Pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman industri ini didukung oleh keadaan alam wilayah Adikarto yang sangat cocok untuk lahan pertanian.

Pada masa pemerintahan Jepang mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri. Beras dari hasil sawah mereka di rampas oleh Jepang, sedangkan masyarakat butuh makan.¹⁰ Akibatnya masyarakat memilih mencari bahan lain yang dijadikan makanan pokok seperti ketela/umbi-umbian dan jagung, pohon pisang,

⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁰ Aiko Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, (Depok: Komunitas Bambu: 2015), hlm. 81.

pohon pepaya untuk dapat bertahan hidup. Semua jenis tanaman ini tanaman yang didorong pemerintah Jepang supaya digunakan sebagai bahan makanan pokok, dan kecuali ubi jalar, semua mengalami penurunan produksi besar-besaran. Penyebab penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:¹¹ (1) faktor iklim, pada tahun 1944 Jawa menderita musim kering yang luar biasa. (2) Kelangkaan tenaga kerja (3) Kelangkaan sapi. Kelangkaan sapi karena permintaan Jepang untuk kepentingan militer juga merupakan alasan penting yang membuat pertanian menjadi tidak efektif. (4) Meningkatnya kerusakan akibat hama tikus. Meningkatnya hama tikus selama pendudukan Jepang karena langkanya bahan kimia yang dapat dipakai untuk membasminya. (5) Memburuknya infrastruktur.

Pada masa pemerintahan Jepang tetap melaksanakan politik desentralisasi seperti Hindia Belanda, tetapi pembentukan daerah tetap di hubungkan dengan siasat militer untuk menghadapi berbagai kemungkinan pada masa perang. Pada masa ini status *Zelfbesturende Landschappen* di Jawa masih dipertahankan, namun namanya diubah, desa menjadi *ku* dan *lanschap* dinamakan *kooti*. Para raja *Lanschappen* ini disebut *Koo* dan dianggap sebagai anggota keluarga dari raja Jepang.¹² Wilayah Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman dijadikan *Kooti* dengan kepala pemerintahannya *Koo*.

Sebelum kedatangan Jepang, masyarakat Pakualaman sudah mengenal Pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda telah lebih dulu mengenalkan sistem pendidikan modern kepada masyarakat Pakualaman. Perkembangan pengajaran dengan sistem

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30-35.

¹² Sutrisno Kutoyo, *op. cit.*, hlm. 209.

sekolah mau tidak mau disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Hindia Belanda saat itu. Pendidikan tinggi hanya bisa didapatkan bagi mereka para kaum keturunan bangsawan dan kaum elit.¹³ Untuk masyarakat rendah mereka lebih memilih untuk mendapatkan pendidikan di langgar atau di masjid karena pendidikan disana lebih kepada pendidikan agama dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan ini pun tidak memerlukan biaya. Madrasah dan pesantren juga lebih diminati masyarakat karena biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan anak-anak mereka tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan sekolah yang disediakan oleh pemerintah.¹⁴

Kemudian dibuka Sekolah Desa bagi masyarakat sekitar. Pada umumnya sekolah desa ini hanya mengajarkan masyarakat untuk sekedar melek huruf saja tanpa adanya muatan pelajaran Bahasa Belanda di dalamnya. Dengan adanya sekolah desa ini tingkat pendidikan masyarakat Pakualaman menjadi semakin baik. Dalam peralihan dari masa pemerintahan Hindia Belanda menuju pendudukan Jepang suasana pendidikan kurang menguntungkan karena saat itu dunia dalam keadaan perang. Penyelenggaraan sekolah-sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda diserahkan kepada daerah Swapraja, maka masa pendudukan Jepang hak mengatur penyelenggaraan pendidikan sekolah tersebut diperluas.¹⁵ Sistem pendidikan pun diubah.

¹³Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Depdikbud, 1993), hlm 17.

¹⁴Endriatmo Soetarto, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, (Yogyakarta: STPN, 2009), hlm. 63.

¹⁵Sri Sutjiatiningsih dan Sutrisno Kutoyo, *op.cit.*, hlm. 112.

B. SISTEM PENDIDIKAN DI WILAYAH PAKUALAMAN TAHUN 1942-1845

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di sekolah dilaksanakan dengan sistem pendidikan tunggal. Instansi pemerintahan militer Jepang yang menangani bidang pendidikan disebut *Bunkyo-kyoku*.¹⁶ Ketika pendudukan Jepang dimulai pada Maret 1942, sebagian besar sekolah yang ada di Jawa ditutup dan pada bulan berikutnya sekolah dasar pribumi baik negeri maupun yang swasta dibuka kembali dan diubah menjadi sekolah rakyat mengikuti instruksi yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang. Kebijakan pendidikan Jepang bertujuan untuk menghapus seluruh pengaruh Belanda dari lingkungan pendidikan dan mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan pada cita-cita Jepang pada masa itu. Namun demikian, dapat diperkirakan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan yang diinginkan oleh Jepang baru dilengkapi dan dipersiapkan untuk menjalankan pendidikan di sekolah dengan diumumkannya kebijakan pendidikan Jepang secara jelas pada September 1943.¹⁷

Bentuk kebijakan pendidikan Jepang di Pakualaman dapat dilihat dari: (1) sistem sekolah tunggal (2) kesempatan belajar yang luas (3) dalam hal pendanaan, uang sekolah masa Jepang relatif lebih murah dibandingkan masa kolonial Hindia Belanda, (4) kurikulum, kegiatan baris berbaris, upacara, kerja bakti, dan olah raga dimasukkan kedalam kurikulum diberbagai jenjang pendidikan, (5) bahasa,

¹⁶Chiyo Kawamura, "Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa pada Masa Pendudukan Jepang dari Prespektif Buku Pelajaran", *Lembaran Sejarah* vol. 7, no.1, 2004, hlm. 156.

¹⁷Djohan Makmur, *op. cit.*, hlm. 100.

penggunaan Bahasa Jepang digiatkan, disamping itu Pakualaman tetap menggunakan Bahasa Jawa sebagai pengantar, (6) buku pelajaran, beberapa daerah disebarkan buku pelajaran baru dengan gambar kulit muka berupa pohon, sakura dan gunung Fuji.¹⁸ Para guru di Pakualaman membuat ringkasan bahan yang akan diajarkan dengan mendasarkan pada buku yang dimiliki sebelumnya. Para murid mendapatkan materi pembelajaran dari apa yang disampaikan guru mereka di kelas. Mereka tuliskan pada sabak yang mereka miliki, sehingga pada saat itu murid-murid tidak dapat mengulang materi pembelajaran yang mereka dapatkan di kelas karena selesai mata pelajaran tersebut mereka menghapus tulisan di atas sabak itu dan menggantinya dengan materi mata pelajaran lainnya.

Terdapat dua jenis sekolah di wilayah Pakualaman, yaitu sekolah negeri dan sekolah partikelir (swasta). Pada awalnya sekolah partikelir di Pakualaman ditutup. Kemudian dibuka kembali. Tujuan dari pendirian sekolah partikelir tersebut harus jelas dan sesuai dengan tujuan Jepang, yaitu kemakmuran Asia Timur Raya. Sekolah di Pakualaman terdiri dari Sekolah Pertama, Sekolah Rakyat dan Sekolah menengah. Adapun beberapa sekolah tahun 1943 antara lain:¹⁹ Sekolah Rakyat Pakualaman I (sekarang SD N Puro Pakualaman I berada di Jalan Harjowinatan No. 14), Sekolah Islamiyah (sekarang SD Islamiyah Pakualaman yang beralamat di Jalan Harjowinatan No. 23), Sekolah Rakyat Margojatan (sekarang SD Negeri Margoyasan yang terletak di Jalan Taman Siswa No. 4), Sekolah Menengah Wates I (sekarang SMP N 1 Wates yang berada di Tebah), Sekolah

Rakyat Butuh (sekarang SD N Butuh yang di daerah, Bumirejo, Lendah), dan Sekolah Rakyat Brosot (sekarang SD Negeri Brosot).

Terdapat Sekolah Rakyat Tionghoa Partikelir di wilayah Adikarto.²⁰ Sekolah tersebut berada Wates dengan jumlah murid pada tahun 1943 berjumlah 76 murid. Adapun guru yang mengajar yaitu Lim Kit An, Hoo Djie Se, dan Liem Tjam Nio. Adapun pelajaran yang diajarkan yaitu latihan rohani, bahasa *Nippon*, bahasa Tionghoa, Bahasa Indonesia, latihan suara, latihan menulis, latihan menggambar dan latihan kerajinan.

Untuk tingkat sekolah menengah atas di Pakualaman disebutkan adanya sekolah menengah kejuruan yaitu Sekolah Dagang Rendah dan Sekolah Taman Tani (Sekarang Perguruan Taman Siswa). Pada masa pemerintahan Jepang, Taman Siswa ditutup. Taman Tani saja yang diperbolehkan untuk dibuka. Hal ini dikarenakan sangat membantu pemerintahan Jepang dalam hal mendidik ilmu praktis dalam hal pertanian. Sekolah Dagang Rendah di dirikan oleh Pemerintah Balatentara *Dai Nippon*. Pada tahun 1943 jumlah murid 97, terdiri dari 87 murid laki-laki dan 10 murid perempuan.

Pada tahun 1944, jumlah murid wilayah Pakualaman yaitu 9247, terdiri dari 6877 murid laki-laki dan 2370 murid perempuan.²¹ Dari data dapat dilihat bahwa murid sekolah kebanyakan adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan kegiatan sekolah dilaksanakan dari pagi hingga siang, sehingga banyak dari mereka yang harus membantu orangtuanya mengolah sawah. Pada masa pendudukan

²⁰Arsip Pakualaman No. 2658. Tentang Pelaporan Sekolah.

²¹Arsip Pakualaman No. 2708 tentang laporan banyaknya guru dan murid-murid Sekolah dan Sekolah Partikelir (swasta) di daerah Adikarto dan Pakualaman, bulan IV tahun 2604.

¹⁸Aiko Kurasawa, *op. cit.*, hlm. 414.

¹⁹Arsip Pakualaman No. 2120 tentang sekolah-sekolah negeri dan partikelir di Pakualaman dan Adikarto.

Jepang, diperkenalkanlah seragam untuk para murid sekolah. Murid-murid Pakualaman juga menggunakan seragam sekolah. Untuk laki-laki menggunakan celana pendek selutut sedangkan untuk perempuan menggunakan rok selutut.²² Adanya seragam sekolah ini menunjukkan bahwa para murid memiliki status yang sama walaupun dari lapisan sosial yang berbeda.

Adapun kegiatan wajib di sekolah berbagai jenjang yaitu (1) upacara, setiap hari para murid harus melaksanakan upacara dan memberi hormat kepada Tenno Heika, (2) Olah raga berupa senam badan (*taiso*), Semua sekolah di Pakualaman baik negeri maupun partikelir mempunyai halaman untuk melakukan olahraga.²³ Olahraga dilakukan di pagi hari sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran di dalam kelas.²⁴ (3) Baris berbaris dan latihan fisik, kegiatan ini bertujuan untuk memelopori dan membentuk murid-murid agar membantu Jepang dalam perang. Pelatihan-pelatihan jasmani berupa pelatihan kemiliteran mengisi aktivitas keseharian para murid. Guna memperlancar proses pendidikan militer, pada tiap-tiap sekolah dibentuk barisan-barisan murid. Murid-murid tersebut terbagi dalam barisan-barisan sesuai dengan jenjang pendidikannya.²⁵ Murid-murid tingkat sekolah dasar disebut *Seinen-tai*, sedangkan barisan murid-murid

sekolah lanjutan disebut *Gakuto-tai*. (4) Kegiatan kerja bakti, adapun edaran kepada para murid S.R. Brosot untuk membantu pekerjaan umum, (5) menanam kapas dan jarak, setiap sekolah mewajibkan para murid untuk menanam kapas dan jarak di pekarangan sekolah.

Segala kegiatan sekolah diawasi oleh Gunseikan. Peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu* dalam *Osamu Seirei* No. 10 Bagian VIII tentang *Mengoeroes dan Mengawasi Sekolah* Pasal 27-32. Dijelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang berada di bawah pengawasan *Syuutyooka* atau *Tokubetsu Sityoo, Gaku-Ku* (badan hukum dalam pendidikan di setiap daerah yang dibentuk oleh *Kentyoo* dan diurus serta diawasi oleh *Sontyoo*, didalam *Gaku-Ku* diangkat beberapa pegawai atas seijin *Kentyoo*, badan hukum ini dibentuk dengan maksud mengadakan pengawasan dan peninjauan terhadap sekolah-sekolah yang dilakukan oleh *Son* atau beberapa *Gaku-Ku* di dalam *Son* tersebut.

Untuk memudahkan dalam mengurus dan mengatur bidang pengajarannya, pakualaman membentuk kantor urusan pengajaran yang disebut dengan Panitia Wiyata Praja Pakualaman. Kantor ini dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap pengajaran yang berada di Pakualaman dan sebagai sarana penghubung langsung dengan Kantor Pengajaran di pemerintahan *Dai Nippon*. Adapun setiap sekolah yang akan didirikan dan ditutup wajib melaporkan ke bagian Panitia Wiyata Praja. Kegiatan belajar mengajar juga diawasi, setiap bulan sekolah harus menyetorkan hasil belajar mulai dari daftar murid hingga perkembangan belajar.²⁶ Untuk

²² Arsip Pakualaman No. 2697. Surat Turunan dari J.M.M Tenno Heika (Tentyo Sen) kepada Paku Alam Ko Somutyokan tanggal 4-VIII-2603 (1943) tentang pembagian bahan pakaian untuk romusha, murid sekolahan, keibodan, peta dan sebagainya.

²³ "Kanak-kanak di Djawa", *Djawa Baroe* No. Istimewa, Tanggal 1-3-2603.

²⁴ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 407.

²⁵ Abu Ahmadi, Pendidikan dari Masa ke Masa, (Bandung: Armico, 1987), hlm 72.

²⁶ Arsip Pakualaman No. 3405 mengenai Surat dari Pemerintah Pakualaman Bagian Pemeriksanaan Sekolah pakualaman kepada Paniradya Wijata Praja.

masalah tamatan sekolah, ijazah diberikan langsung dari kantor pengajaran *Dai Nippon* dan dikirimkan ke Wiyata Praja.

Kebijakan dalam bidang pendidikan yang diterapkan tersebut membawa dampak bagi murid Pakualaman. Salah satu dampak dari kebijakan ini ialah bahwa kehidupan sekolah tidak boleh bersifat terlalu intelektualistik. Semua program pendidikan harus lebih bersifat praktis dan segera dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam arsip dijelaskan bahwa para *shidoin* merupakan lulusan dari sekolah tani.²⁷ Pada masa Jepang, pendidikan bersifat militeristik, akibatnya kegiatan belajar mengajar dalam kelas porsinya lebih sedikit dibandingkan kegiatan di luar kelas. Selain itu, terjadi penurunan kualitas pendidikan. Mengenai mutu pendidikan sekolah secara umum, walaupun Jepang mendorong pendidikan berkembang secara luas, namun mutu pendidikan semakin menurun. Hal ini dikarenakan hanya sedikit waktu yang digunakan untuk kegiatan di dalam kelas.

Setelah mengikuti pembelajaran dengan tenggang waktu sesuai jenjang pendidikannya, para murid melaksanakan ujian.²⁸ Selain dari ujian tersebut, adapun kriteria yang harus dicapai dalam setiap jenjang pendidikan. Untuk jenjang sekolah dasar, murid tersebut dinyatakan lulus jika dapat membaca, menulis, berhitung dan mengetahui sejarah Jepang. Untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas tidak ditemukan data mengenai kriteria lulusan sekolah tersebut. Adapun data tentang murid yang dinyatakan lulus di Pakualaman.

²⁷Arsip Pakualaman No. 2066 tentang *Shidoin* yang mengoeroes hasil bumi di Adikarto.

²⁸Abu Ahmadi, *op.cit.*, hlm. 73.

Tidak seperti halnya pada masa kolonial Belanda bahwa lulusan dari sekolah desa atau sekolah rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan.²⁹ Namun, pada masa Jepang, lulusan Sekolah Rakyat dapat mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. Lulusan Sekolah Rakyat di Pakualaman mendapatkan jabatan di pemerintahan. Adapun nama-nama lulusan sekolah yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan pada tahun 1944 yaitu: R.M. Sadana, tamatan S.R. Wates I, bekerja sebagai pengurus Tonari Gumi, Soebeki, tamatan S. R. Pakualaman I, bekerja sebagai juru tulis bagian *Rantam Harta*, dan Soebardja, tamatan S.R. Pakualaman I, bekerja di pemerintahan sebagai juru tulis bagian *Harta Nipoena*.

C. KEBIJAKAN JEPANG DALAM MASALAH TENAGA PENGAJAR DI PAKUALAMAN 1942-1945

Selama pendudukan Jepang guru sangat langka.³⁰ Hal ini disebabkan karena perluasan pendidikan sekolah serta meningkatnya permintaan akan tenaga guru dari sektor-sektor kemasyarakatan lainnya. Langkanya profesi guru pada masa Jepang menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh para guru yang sudah ada menjadi semakin besar. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa tiap kelas menjadi semakin banyak.³¹ Selain itu, guru juga mendapat beban ganda karena selain mengajar, mereka juga harus melakukan pekerjaan politik, seperti propaganda, kursus, pengajaran untuk umum, dan sebagainya.

Jumlah guru di Pakualaman pada tahun 1944 yaitu 165 orang (terdiri dari 138 guru

²⁹Parinem, *Pekembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942*, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2006), hlm. 46.

³⁰Djohan Makmur, *op.cit.*, hlm. 100.

³¹Aiko Kurasawa., *op.cit.*, hlm. 400.

laki-laki dan 27 guru perempuan.³² Guru-guru Pakualaman merupakan tamatan dari Sekolah Guru Jetis dan beberapa guru mendapat *Kentei Siken*. Guru di wilayah Pakualaman berasal dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari Sri Pakualam VIII tentang perekrutan guru di sekolah-sekolah Pakualaman. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sekolah wilayah Pakualaman-Syi (dalam kota) guru maupun calon pelamar guru harus tinggal di wilayah Pakualaman-Syi. Hal tersebut juga berlaku di wilayah Adikarto. Hal ini agar memudahkan para guru dalam kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan-kegiatan diluar sekolah (seperti kegiatan baris berbarisdan kegiatan pemerantasan buta huruf biasanya dilakukan didaerah masing-masing).³³ Pada awal pemerintahan Jepang, Pakualaman masih menggunakan guru-guru bekas sekolah masa kolonial Belanda.

Kemudian, dalam hal pengajaran, peran guru sangat dominan. Guru berperan sebagai penyebar semangat Jepang. Isi pengajaran pokok antara lain:³⁴ (1) Pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda dan untuk kepentingan perang. (2) Untuk melipatgandakan hasil bumi, murid-murid diharuskan membuat pupuk kompos, menanam kapas, dan menanam jarak (3) Latihan jasmani berupa latihan-latihan kemiliteran dan mengisi aktivitas-aktivitas murid sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah tenaga pengajar di Pakualaman, Jepang membuat beberapa kebijakan antara lain; mengadakan

kursus Bahasa *Nippon* untuk para guru. Pada akhir kegiatan kursus, guru-guru ini mengikuti ujian kecakapan bahasa dan diberi nilai menurut kemampuan mereka., Adapun beberapa guru Pakualaman yang mengikuti ujian kecakapan Bahasa *Nippon* tahun 1943 yaitu F.M. Mangoensoebrata, R.H. Soedijono, Soekanto, Martaharsana, Poedjasoedarma, R. Soeparna, Drijaatmadja, Mangkoewardaja, dan R.F. Sisworahardjo.³⁵

Sekolah guru, Untuk menutupi masalah kekurangan guru, pemerintah pendudukan Jepang membuka jenis-jenis pendidikan guru. Seperti halnya pada masa kolonial Belanda, Jepang membuka sekolah untuk para guru. Pendidikan guru ini tidak bersifat dualistik sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Disetiap daerah terdapat pendidikan guru berupa sekolah-sekolah. Pusatnya ada di Jakarta. Pendidikan guru ini diawasi langsung oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Sekolah Guru yang berada di wilayah Karesidenan Yogyakarta adalah Sekolah Guru di Jetis. Banyak calon guru Pakualaman yang merupakan tamatan dari sekolah tersebut. Sekolah guru ini tidak dikenakan biaya, sehingga banyak yang mengikuti pendidikan di sekolah guru. Dengan adanya sekolah guru, banyak guru-guru Pakualaman yang mendapatkan ijazah sekolah guru dan diterima menjadi guru Sekolah Rakyat di daerahnya masing-masing. Dalam arsip disebutkan bahwa adapun guru Pakualaman yang mendapatkan ijazah Sekolah Guru Jetis pada tahun 1944 yaitu Soebana, Soebeki, dan Wirdjana, kemudian mereka diangkat menjadi guru di Sekolah Rakyat Margojasan.

³²Arsip Pakualaman No. 2708 tentang laporan banyaknya guru dan murid-murid Sekolah dan Sekolah Partikelir (swasta) di daerah Adikarta dan Pakualaman, bulan IV tahun 2604.

³³Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 437.

³⁴Ary H Gunawan, *op.cit.*, hlm. 26.

³⁵Arsip Pakualaman No. 2119. tentang Ujian Bahasa Nippon daerah Pakualaman Syi dan Adikarto Ken.

Latihan dan kursus guru, Kursus latihan pertama untuk guru sekolah sudah diselenggarakan sejak Juni 1942.³⁶ Pelajaran yang diajarkan pada pusat latihan ini adalah hal-hal yang menyangkut budaya Jepang, bahasa Jepang, nyanyian, gerak badan, latihan kemiliteran, pengajaran dan moral. Adapun guru-guru yang mengikuti pelatihan ini pada tahun 1944 yaitu: R. Adj. Siti Partinah, Rr. Sapartinah, dan R. Ngt. Oemikalsoem.

Selain pusat pelatihan yang ada di Jakarta, diadakan pula pusat-pusat latihan disetiap kabupaten dengan kurikulum yang kurang lebih serupa. Adapun surat dari *Wedana Wijata Pradja Pakualaman* mengenai latihan guru Sekolah Pertama Negeri yang berbunyi:

Dengan ini dipermakloemkan bahwa telah dipoatoeskan oleh jang berwadjib akan melatih sekalian goeroe2 SP Negeri laki2 maepoen perempoean berganti-ganti, oentoek lebih menginsjafkan mereka tentang kewadajibannja dan menambah pengetahoean jang berhoeboeng dengan pendidikan....³⁷

Berdasar surat *kekancingan* Bupati Papatih di Praja Pakualaman tanggal 23 Mei 1944 Nomor 66/10/3.t.P, untuk mengisi adanya kekurangan guru, maka orang-orang dengan tamatan kursus guru dapat diangkat sebagai guru di sekolah Pakualaman. Adapun nama-nama guru yang diangkat antara lain: (1)

³⁶Dedi Supriadi, *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, (Jakarta: Depdikbud, 2003), hlm. 15.

³⁷Arsip Pakualaman No. 2070 tentang Berkas tentang kursus bagi Guru-guru di Pakualaman dari Paniradya Pati Wijata Praja Pakualaman.

Soemarja, tamatan kursus guru, lahir tanggal 10 Juni 2585 di Wanasidi, Wates, Adikarto, diangkat menjadi guru pembantu di Sekolah Kawula Pakualaman di Karangwuni, Wates dengan gaji f. 10,- (sepuluh rupiah) perbulan. (2) Kambjah, tamatan kursus guru, lahir tanggal 12 Juni 2585 di Brosot, Adikarto, diangkat menjadi guru pembantu di Sekolah Kawula Pakualaman di Brosot II dengan gaji f. 10,- (sepuluh rupiah) perbulan.

Kebaktian para pendidik, Berbeda dengan masa kolonial Belanda dimana guru-guru membentuk satu wadah organisasi sebagai wadah perkumpulannya, pada masa pendudukan Jepang dapat dikatakan tidak ada wadah yang menaunginya.³⁸ Pengerahan para guru dalam *Jawa Hokokai* itu sepenuhnya diharapkan menjadi potensi sosial masyarakat dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya.³⁹ Pengerahan para guru dalam *Jawa Hokokai* itu sepenuhnya diharapkan menjadi potensi sosial masyarakat dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Adapun data guru-guru Pakualaman yang masuk dalam barisan *Kyoiku Hokokai* pada bulan November 1944 yaitu:⁴⁰ Martomarijo, Karjan, Paidjan, Soewardi, Amatsoejono, Toekidi, dan Soekadi. Guru-guru yang tergabung dalam *Kyoiku Hokokai* harus melaporkan ke bagian urusan pengajaran di Pakualaman. Segala kegiatan yang ada didalamnya juga ikut dilaporkan.

Dalam hal tenaga pengajar, Paniti Wiyata Praja berperan dalam hal pengangkatan, pemberian ijin dan

³⁸Soemarmo, *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 2001), hlm. 26.

³⁹*Ibid.*, hlm. 124.

⁴⁰Arsip Pakualaman No. 5435. Tentang Daftar Guru yang mengikuti *Kyoiku Hokokai*

pemberhentian guru. Pengangkatan, yaitu pengangkatan guru guru baru maupun pengangkatan guru lama yang diangkat dengan pangkat lebih tinggi. Dalam urusan perijinan, setiap guru yang sakit, cuti, atau melakukan kegiatan diluar wajib melakukan ijin ke Bagian Wiyata Praja Pakualaman.

Dalam surat Parintah Kadhipaten Pakualaman tanggal 29 januari 1944 menerangkan beberapa guru yang diberikan ijin karena sedang sakit. Nama guru tersebut adalah Soemardi, Abdi dalem Guru Bantu di Sekolah Rakyat Sogan dengan ijin libur selama 13 hari dari tanggal 14 Desember 1943. R. Soetandar Tjokrosoetirto, Abdi dalem Kepala Guru di Sekolah Wates dengan ijin libur selama 14 hari dari 14 Desember 1943.⁴¹ Dalam surat Parintah Kadhipaten Pakualaman tanggal 26 Agustus 1944 menerangkan beberapa guru yang diberikan ijin karena hal lain, guru tersebut yaitu: R. Ngt.Oemi kalsoem, Abdi dalem Guru Bantu di Sekolah Rakyat Sindutan dengan ijin libur selama 32 hari mulai tanggal 19 Agustus 1944 karena sedang mempunyai anak. Darmasoedirdja, Abdi dalem Guru Bantu di Sekolah Rakyat Sindutan dengan ijin libur selama 22 hari mulai tanggal 10 Mei 1944 karena sedang sakit. 3. Soehadi, Abdi dalem Guru Bantu di Sekolah Rakyat Sogan, dengan ijin libur selama 12 hari mulai dari 15 Juni 1944.

Diberhentikannya seorang guru dari jabatannya dikarenakan beberapa hal antara lain karena mendapat perintah dari *Gunseikan*, pindah wilayah, mengikuti kegiatan barisan pelopor. Adapun pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh Wiyata Praja Pakualaman: Soemidi, Kepala Sekolah Rakyat Wates II, diberhentikan pada tanggal 1 Maret

1944 karena ia bekerja di S.M.P.P Yogyakarta dengan perintah Dai *Nippon*. R.C. Roekmini Hartati, Guru Pembantu Sekolah Rakyat Wates II, diberhentikan karena ia pindah ke Kasultanan.⁴² Perpindahan tugas ke wilayah lain mengakibatkan guru tersebut di berhentikan dari jabatannya di wilayah sebelumnya. Adapun pemberhentian yang lain yaitu: melalui surat kekancingan Bupati Papatih Dalem Praja Pakualaman No. 93/10/3b tanggal 15 Oktober 1944 memberhentikan Wardani, Guru Pembantu di Sekolah Pakualaman karena bekerja menjadi *Kopenheihoo*.

Pada masa pendudukan Jepang penyelenggaraan pendidikan kurang teratur.⁴³ Walaupun telah dibuka kembali sekolah-sekolah disemua jenjang, namun masih banyak murid-murid yang tidak dapat mengikuti kegiatan persekolahan dikarenakan tidak adanya waktu untuk pergi ke sekolah, karena kegiatan sekolah berlangsung dari pagi hingga siang.⁴⁴ Hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat Pakualaman yang mengalami buta huruf. Sehubungan dengan hal tersebut, wilayah Pakualaman mengadakan pemberantasan buta huruf dengan membentuk *Paniti Pambrasta Woeta Sastra*. Kegiatan ini dilakukan selama 60 menit dibagi menjadi 5 kegiatan. Pada awal tahun 1945, kegiatan pemberantasan buta huruf ini dihentikan. Penghentian tersebut dikarenakan banyak guru yang tidak dapat mengajar kegiatan pemberantasan buta huruf tersebut. Guru Pakualaman baik guru sekolah rakyat maupun sekolah pertikelir, diluar kegiatannya mengajar

⁴² *Ibid.*

⁴³ Najamudin, *Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air Tahun 1800-1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 71.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴¹ Arsip Pakualaman No. 5429 mengenai Surat Ketetapan perihal mengenai pengisian kekurangan guru.

dikelas, diperintahkan untuk mengikuti kegiatan sosial oleh *Gunseikan*.

Dalam hal kesejahteraan, pada masa pemerintahan Jepang, status guru sekolah ditinggikan. Mereka diberi status sebagai pegawai pemerintah. Guru sekolah pada umumnya dihargai sewaktu pendudukan Jepang. Hal ini sebagian karena dalam tradisi Jepang kehormatan dan penghargaan tinggi diberikan kepada siapapun yang menawarkan pengajaran, tetapi juga karena guru sekolah dianggap sebagai kelompok sosial yang agak mudah dimasuki semangat Jepang.⁵⁸ Para guru sering mendapatkan hadiah dari pemerintah Jepang. Seperti dalam surat dari Wiyata Praja Pakualaman mengenai hadiah yang dibagikan oleh Tenta Setsu kepada guru dan sebagian murid sekolah.⁴⁵ Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pada Hari Lebaran para guru mendapatkan hadiah berupa kebutuhan pokok.

Mengenai gaji yang diberikan, para guru mendapat gaji yang berbeda pada setiap jenjang sekolah. Untuk gaji Sekolah Rakyat yaitu Rp. 38,-.⁴⁶ Untuk gaji sekolah menengah, yaitu sebesar Rp. 40,-. Selain gaji yang sudah ditetapkan diatas, ada pula gaji yang diperuntukkan bagi guru-guru sekolah yang mempunyai ijazah bahasa *Nippon*. Ijazah ini dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan ujian bahasa *Nippon*.⁴⁷ Mereka yang mencapai tingkat lima diberi tunjangan f. 1.00 dan tingkat tiga memperoleh tunjangan f. 3.50.

⁴⁵Arsip Pakualaman No. 2497. Pembagian hadiah dari Tenta Setsu.

⁴⁶“Atoeran tentang mendjalankan kentei shaken oentoe mendjadi goeroe sekolah rakjat dengan tjara loear biasa”, *Kan Po*, No. 59, 25 januari 1945, hlm. 6-9.

⁴⁷Arsip Pakualaman No. 2119. Tentang Ijazah bahasa *Nippon*.

Kebijakan Jepang dalam sistem pengajaran berdampak pada peran seorang guru. Guru diharuskan untuk mengikuti kursus dan latihan guru, latihan tersebut mengajarkan hal-hal yang harus diajarkan pada murid-murid di sekolah. Tidak hanya itu, Jepang memberikan pengawasan ketat terhadap guru-guru di sekolah. Selain itu, dampak dengan dihapusnya sistem dualisme pendidikan, sebutannya sebagai guru sekolah desa hilang, secara formal derajat mereka disamakan dengan guru-guru lain. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah desa tidak ditutup, hanya berganti nama menjadi sekolah rakyat. Hal ini membuat para tenaga pengajar tidak perlu khawatir karena mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain yang dapat menurunkan prestisnya. Status guru desa ditingkatkan.⁴⁸

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan merupakan alat untuk menyebar luaskan doktrin-doktrin Jepang. Peran guru sangat penting sebagai orang yang menyebarkan doktrin tersebut kepada para murid di sekolah. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan pemerintah Jepang untuk merekrut guru-guru dengan mengadakan pelatihan dan sekolah guru. Selain mengajar di dalam kelas, para guru digerakkan untuk berbagai pekerjaan sukarela seperti kampanye propaganda, kursus pengajaran untuk umum, latihan kemiliteran. Para guru Pakualaman banyak mengambil bagian dalam organisasi *seinendan*, banyak guru yang ditunjuk sebagai pelatih. Adapun dalam arsip dijelaskan bahwa Toekidjan seorang guru di Sekolah Rakyat Wates ditugaskan untuk menjadi pelatih barisan *seinendan* di daerah Adikarto pada bulan Maret 1943.⁴⁹

⁴⁸Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 416.

⁴⁹Arsip Pakualaman No. 5435 Berkas Surat Ijin Guru.

Dampak yang lain yaitu bahwa guru sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Pakualaman mengadakan kegiatan pemberantasan buta huruf. Kegiatan ini dilakukan oleh guru-guru sekolah diluar lingkungan kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat luas pun sangat membutuhkan keberadaan guru, disamping mengajarkan mereka untuk dapat menulis dan membaca, mereka juga mengajarkan ilmu praktis. Oleh karena itu para guru sangat dikenal dilingkungan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pakualaman terbentuk dari adanya perjanjian Giyanti antara pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dengan kelompok Pangeran Mangkubumi, yang terdiri dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Wijil, Pangeran Krapyak dan Pangeran Hadiwijoyo. Isi dari perjanjian tersebut adalah wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yogyakarta sendiri dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Pakualaman berdiri terpisah dengan keraton Yogyakarta, walaupun begitu Pakualaman tetap menghormati keraton sebagai wilayah pemerintahan yang lebih dulu berdiri sebelum Pakualaman. Sistem pemerintahan di Pakualaman mirip dengan yang ada di keraton, karena Pakualaman muncul dari sebagian wilayah Kasultanan dan merupakan kerajaan termuda. Wilayah Pakualaman meliputi wilayah dalam kota dan wilayah luar kota. Wilayah dalam kota menjadi wilayah administratif Pakualaman.

Pada awal masa pendudukan Jepang, sistem sekolah diubah. Pendidikan di sekolah dilaksanakan dengan sistem pendidikan tunggal, termasuk di wilayah Pakualaman. Banyak sekolah-sekolah yang di buka kembali, baik sekolah negeri maupun sekolah partikelir.

Tujuan pendidikan didasarkan pada “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, maka kepada murid-murid dikenakan ketentuan dan indoktrinasi yang sangat ketat. Kegiatan seperti upacara, olahraga, kerjabakti, dan latihan fisik dimasukkan dalam kurikulum diberbagai jenjang pendidikan. Kebijakan pendidikan Jepang diterapkan di Pakualaman, namun karena status Pakualaman adalah wilayah kooti, maka Pakualaman dapat mengurus bidang pendidikannya sendiri disamping harus mentaati kebijakan pendidikan Jepang. Pakualaman membentuk kantor urusan pengajaran yang sering disebut Wiyata Praja Pakualaman. Fungsi Wiyata Praja selain membuat kebijakan juga menyebarkan perintah kebijakan Jepang kepada guru dan murid di wilayah kekuasaan Pakualaman. Kebijakan pendidikan Jepang dan kebijakan pendidikan Wiyata Praja Pakualaman berjalan beriringan.

Selain kebijakan dalam sistem pendidikan, Jepang juga membuat kebijakan dalam hal sistem pengajaran. Agar terdapat keseragaman dalam pengertian dan maksud pemerintah Jepang, maka bagi beberapa guru dari tiap daerah/kabupaten yang dipusatkan di Jakarta dilakukan latihan/indoktrinasi khusus. Kemudian setelah mengikuti latihan tersebut, mereka harus melatih teman-teman guru mereka mengenal hal yang mereka peroleh dari Jakarta. Ada pula kebijakan mengenai penggunaan bahasa Nippon, dimana guru-guru harus mengikuti kursus bahasa Nippon. Banyak guru-guru Pakualaman yang mendapat ijazah Bahasa Nippon.

Kesejahteraan guru di Pakualaman meningkat, guru diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Gaji guru pun ikut meningkat. Tidak hanya itu, guru sangat disejahterakan oleh pemerintah Jepang. Selain dampak yang menguntungkan tersebut, ternyata kebijakan pengajaran yang diterapkan oleh Jepang

membawa dampak buruk bagi tenaga guru. Mereka mengemban tanggungjawab yang sangat banyak, dimana selain mengajar di dalam kelas mereka juga aktif melakukan kegiatan di luar kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Arsip Pakualaman No. 2066 tentang Shido in yang mengoeroes hasil bumi di Adikarto.

Arsip Pakualaman No. 2070 tentang Berkas tentang kursus bagi Guru-guru di Pakualaman dari Paniradya Pati Wijata Praja Pakualaman.

Arsip Pakualaman No. 2119. tentang Ujian Bahasa Nippon daerah Pakualaman Syi dan Adikarto Ken.

Arsip Pakualaman No. 2120 tentang sekolah-sekolah negeri dan partikelir di Pakualaman dan Adikarto.

Arsip Pakualaman No. 2497. Pembagian hadiah dari Tendo Setsu.

Arsip Pakualaman No. 2658. Tentang Pelaporan Sekolah.

Arsip Pakualaman No. 2697. Surat Turunan dari Tenno Heika kepada Paku Alam Ko Somutyokan tanggal 4-VIII-2603 tentang pembagian bahan pakaian untuk romusha, murid sekolahan, keibodan, peta dan sebagainya.

Arsip Pakualaman No. 2708 tentang laporan banyaknya guru dan murid-murid Sekolah dan Sekolah Partikelir (swasta) di daerah Adikarta dan Pakualaman, bulan IV tahun 2604.

Arsip Pakualaman No. 2761 tentang Syarat menjadi guru di Pakoelalaman-Si dan Adikarto-Ken

Arsip Pakualaman No. 3405 mengenai Surat dari Pemerintah Pakualaman Bagian

Pemeriksaan Sekolah pakualaman kepada Paniradya Wijata Praja.

Arsip Pakualaman No. 5429 mengenai Surat Ketetapan perihal mengenai pengisian kekurangan guru.

Arsip Pakualaman No. 5435. Tentang Daftar Guru yang mengikuti *Kyoiku Hokokai*

Buku dan Jurnal:

Abu Ahmadi, Pendidikan dari Masa ke Masa, Bandung: Armico, 1987.

Chiyo Kawamura, "Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa pada Masa Pendudukan Jepang dari Prespektif Buku Pelajaran", *Lembaran Sejarah* vol. 7, no.1, 2004.

Dedi Supriadi, *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud, 2003.

Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: Depdikbud, 1993.

Endriatmo Soetarto, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, Yogyakarta: STPN, 2009.

Fajriudin Muttaqin dan Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Bandung: Humaniora, 2015.

Hariyono, *Penerapan status bahaya di Indonesia: Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru*, Jakarta: Pensil-324, 2008.

Haryadi Baskoro, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kurasawa, Aiko, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, Depok: Komunitas Bambu: 2015.

Najamudin, *Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air Tahun 1800-1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi: 2005.

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Imporium sampai Emporium 1500-1900*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Soemarmo, *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2001.

Sri Sutjianingsih, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

Suhartono W Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Suwarno, P.J., *Hamengku Buwono dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Skripsi:

Parinem, "Pekembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2006.

Surat Kabar:

"Atoeran tentang mendjalankan kentei shaken oentoek mendjadi goeroe sekolah rakjat dengan tjara loear biasa", *Kan Po*, No. 59, 25 januari 1945.

"Kanak-kanak di Djawa", *Djawa Baroe* No. Istimewa, Tanggal 1-3-2603.

BIODATA

Nama : Resiani Melinda
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5-5-1994
Riwayat Pendidikan : SDN Lempuyangan III
SMPN 3 Yogyakarta
SMAN 7 Yogyakarta

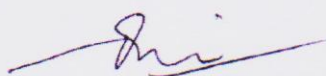
Yogyakarta, 7 Desember 2018

Pembimbing



Ririn Darini, M. Hum
NIP. 19580121 198601 1 001

Reviewer



Dina Dwikurniarini, M. Hum
NIP. 19571209 198702 2 001